

BAB VI

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang berjudul “Studi Dampak Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Toba *Pulp* Lestari (TPL) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Sihas Dolok I, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan” dapat disimpulkan bahwa:

1. Dampak yang terjadi akibat adanya aktivitas HTI yang dilakukan PT.TPL di Desa SIHAS Dolok I adalah bersifat langsung atau berdampak primer bagi kehidupan masyarakat. Adapun dampak yang bersifat langsung adalah perubahan jenis pekerjaan, berkembangnya struktur ekonomi dan peningkatan pendapatan ekonomi.
2. Dampak perubahan jenis pekerjaan yang terjadi di Desa SIHAS Dolok I adalah banyak masyarakat yang memiliki profesi tambahan menjadi bahagian dari kegiatan HTI milik PT. TPL tersebut. Sebelumnya masyarakat hanya bekerja sebagai petani, berkebun, kuli bangunan dan pekerja yang tidak tetap, akan tetapi setelah adanya aktivitas HTI maka masyarakat mendapatkan pekerjaan tambahan sebagai buruh harian lepas di lahan HTI PT. TPL.
3. Dampak peningkatan pendapatan ekonomi yang terlihat di Desa SIHAS Dolok I adalah meningkatnya pendapatan ekonomi para buruh HTI yang ikut serta dalam aktivitas HTI tersebut. Rata-rata pendapatan mereka mencapai Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 1.500.000. per orang setiap bulan. Apabila digabungkan dari hasil upah buruh di HTI dan pekerjaan di luar HTI maka

pendapatan para responden berkisar antara Rp.2.000.000. – lebih dari Rp.2.500.000. Dengan demikian mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup menjadi lebih baik dan sejahtera, misalnya dapat membeli kebutuhan pokok, kendaraan, membangun rumah, membeli kelengkapan rumah, biaya pendidikan anak dan lain – lain.

B. SARAN

Berkaitan dengan kesimpulan diatas tersebut, maka saran yang ditujukan antara lain:

1. PT. TPL selaku pemilik HTI mengutamakan buruh yang berasal dari Desa SIHAS Dolok I dan menambah luas HTI dengan mengontrak tanah kosong masyarakat yang tidak terpakai sehingga para buruh memiliki jumlah hari kerja yang banyak yang akan berdampak langsung dalam peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk terlibat program nasional “*Social Forestry*” atau Perhutanan Sosial yang berorientasi pada pelestarian hutan dengan model kemitraan dengan HTI.
3. Pemerintah daerah melalui Pemdes, bagian hukum dan pemerintah desa untuk menyusun draf perdes mengenai hubungan timbal balik saling pengertian antara masyarakat lokal dengan kawasan HTI, karena merupakan satu kesatuan ekosistem yang saling mempengaruhi.